

Asimilasi sebagai Terjemahan Bentuk Adaptasi dalam Resiliensi Komunitas Kampung Kota di Kampung Sudioprajan Surakarta

Assimilation as a Translation of Adaptation Form of Kampung Kota Community Resilience in Kampung Sudioprajan Surakarta

Tendra Istanabi^a, Muhammad Sani Roychansyah^b, Deva Fosterharoldas Swasto^c

^aDepartmen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, UGM

^bDepartmen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, UGM

^cDepartmen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, UGM,
Email: istanabitendra@gmail.com

Abstrak

Resilience is a concept that integrates between mitigation, adaptation and innovation. On a smaller scale, community-based resilience forms a translation of strong social capital. In Indonesia the majority of the urban community is formed in a container called Kampung Kota. Kampung Kota has the character of tolerance, cohesiveness, and solidarity. Kampung Kota becomes important to be used as research setting because with its characteristic, Kampung Kota able to produce its own value so that it can face threat, pressure and turmoil with their own way. Kampung Sudioprajan is one of the kampung Kota in Surakarta City that has unique resilience experience especially related to the relationship between Javanese and Chinese. This study aims to determine the concept of resilience that is formed in Kampung Sudioprajan as part of the Kampung Kota community. Kampung Sudioprajan can give an idea of resilience concept of community scale which tend to original and typical. This research uses case study methodology by exploring the form of resilience conducted in Kampung Sudioprajan. This study found the uniqueness of adaptation process of Kampung Sudioprajan community. Adaptation is translated in the form of assimilation. The assimilation resulted in the social condition of the society which tends to be more fluid, especially in the face of several times the events that become threats, pressure, and turmoil for the Chinese. Assimilation creates a new value that becomes the glue of the relationship for the Javanese Ethnic community and the Chinese Ethnic Community.

Keywords: *Asimilasi, Kampung Kota, Sudioprajan, resiliensi, resiliensi komunitas*

Abstract

Resiliensi merupakan konsep yang mengintegrasikan antara mitigasi, adaptasi dan inovasi. Dalam skala yang lebih kecil resiliensi berbasis komunitas menjadi bentuk terjemahan dari modal sosial yang kuat. Di Indonesia mayoritas komunitas masyarakat kota terbentuk dalam sebuah wadah yang disebut kampung kota. Kampung kota memiliki karakter berupa toleransi, kohesifitas, dan kesetiakawanan. Kampung kota menjadi penting untuk dijadikan setting penelitian karena dengan karakteristik khususnya kampung kota mampu memproduksi nilai tersendiri sehingga mampu menghadapi ancaman, tekanan maupun gejolak dengan caranya. Kampung Sudioprajan merupakan salah satu kampung di Kota Surakarta yang memiliki pengalaman unik resiliensi terutama terkait hubungan antara Etnis Jawa dan Etnis Tionghoa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep resiliensi yang terbentuk di Kampung Sudioprajan sebagai bagian

dari komunitas kampung kota. Kampung Sudioprajan dapat memberikan gambaran konsep resiliensi skala komunitas yang cenderung original dan khas. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus dengan melakukan eksplorasi terhadap bentuk dari resiliensi yang dilakukan di Kampung Sudioprajan. Penelitian ini menemukan keunikan proses adaptasi komunitas Kampung Sudioprajan. Adaptasi diterjemahkan dalam bentuk asimilasi. Asimilasi tersebut menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang cenderung lebih cair terutama dalam menghadapi berberapa kali peristiwa yang menjadi ancaman, tekanan, maupun gejolak bagi Etnis Tionghoa. Asimilasi menghasilkan nilai baru yang menjadi perekat hubungan bagi komunitas Etnis Jawa dan Komunitas Etnis Tionghoa.

Keywords: Assimilation, Kampung Kota, Sudioprajan, Resilience, Community-based resilience.

1. PENDAHULUAN

Resilensi merupakan terminologi yang digunakan di banyak disiplin ilmu (Brown, Dayal, & Rumbaitis Del Rio, 2012). Resiliensi berasal dari istilah latin *resilire* yang berarti 'bersemi kembali'. Pada awalnya istilah ini digunakan oleh para ilmuwan fisika pada tahun 1960-an resiliensi memasuki ranah ilmu ekologi atau lingkungan tahun 1970-an oleh Crawford Stanley dalam artikelnya yang mempertegas gagasan lingkup resiliensi dalam ranah keteknikan dan lingkungan (Davoudi et al., 2012). Ilmu psikologi dan kebencanaan juga telah menggunakan terminologi ini sebelumnya (Matyas, Regional, Adviser, Pelling, & Kingdom, 2015). Saat ini konsep resiliensi semakin berkembang dan digunakan dalam istilah dalam ilmu sosial (Adger, 2000; Wilkinson, 2011) dan juga ekonomi, terutama terkait dengan kemampuan menahan gejolak ekonomi (Simmie & Martin, 2010; Lang, 2012).

Roychansyah (2012) menjelaskan resiliensi merupakan sebuah irisan yang mencakup upaya mitigasi, adaptasi, dan inovasi. Mitigasi merupakan upaya pengurangan risiko saat terjadi ancaman maupun guncangan yang disesuaikan dengan kapasitas objek. Adaptasi merupakan upaya menyesuaikan diri terhadap keberadaan risiko. Sementara inovasi adalah upaya implementasi kegiatan yang dianggap baru untuk mampu bangkit dari kondisi sebelumnya.



Gambar 1. Skema Proses Resiliensi
Sumber: Roychansyah, 2012

Dalam skala wilayah yang lebih kecil resiliensi terbentuk dari modal sosial yang dihasilkan oleh sebuah komunitas. Resiliensi menjadi jembatan penghubung antara isu sosial, ekonomi, dan lingkungan dimana komunitas sosial selalu tergantung lingkungan tempat tinggal (Adger, 2000). Komunitas menjadi salah satu lingkup yang membentuk hierarki sistem resiliensi tersebut (Žilėnienė, 2014). Komunitas menjadi bagian dalam sistem kebijakan dalam tahap mitigasi yang mampu menghadapi acaman lokal (Godschalk, 2014). Karakteristik komunitas yang resilien menurut IFRC (2012) yaitu komunitas yang berwawasan luas, memiliki kemampuan berorganisasi dan managerial, memiliki konektivitas, memiliki sarana penunjang dan memiliki peluang ekonomi.

Masyarakat Indonesia secara tradisional berkumpul dan bermukim membentuk sebuah sistem permukiman yang dikenal dengan kampung. Setiap kampung akan memiliki wajah tersendiri yang berbeda dengan kampung lainnya. Identitas, keunikan dan kekhasan kampung kota merepresentasikan sejarah, kemampuan, usaha, perjuangan dan jiwa raga warganya. Walaupun secara fisik seringkali kampung perkotaan dicirikan dengan ketidakteraturan, ketidakmapanaan, ketidakamanan, namun dalam beberapa hal kekhasan kampung justru mampu melampaui nalar akademik, kampung menjadi sistem sosial yang kompleks dan dinamis untuk mampu mengembangkan prinsip-prinsip keragaman, toleransi, dan gotong-royong (Setiawan, 2010). Maka dari itu kampung sebagai kumpulan dari rumah-rumah jangan hanya dipandang sebagai prospek fisik saja, hingga dinamikannya hanya diamati secara kuantitatif, seharusnya melihat juga dari sisi kualitatif secara lebih luas dan mendalam. (Silas, dalam Budiharjo, 2009).

Kampung Sudiroprajan memiliki pengalaman menghadapi ancaman, tekanan, maupun gejolak dalam bidang sosial. Kampung Sudiroprajan tumbuh beriringan dengan pertumbuhan Kota Surakarta sejak dari zaman dahulu. Kota Surakarta yang dahulu merupakan ibukota Kasultanan Mataram menjadikan kota ini memiliki daya tarik sehingga banyak kalangan datang untuk berdagang. Berbagai kalangan tersebut datang dari penjuru nusantara dengan latar belakang etnis yang berbeda. Beberapa kelompok etnis tersebut kemudian bertempat tinggal, bermukim, dan beranak-pinak di Surakarta yaitu seperti Etnis Tionghoa yang terkonsentrasi terutama di Kelurahan Sudiroprajan, etnis Arab di kelurahan Pasar Kliwon, dan etnis Banjar di Kelurahan Jayengan (Indrayanti, 2009)

Dalam perkembangannya, kehidupan masyarakat pendatang dengan pribumi ternyata tidak berjalan dengan kondusif terutama hubungan pribumi dengan Etnis Tionghoa. Tercatat dalam sejarah terjadi beberapa kali gesekan sosial yang melibatkan dua kelompok etnis sosial. Dimulai sejak zaman Mataram

yaitu dengan adanya geger pecinan, kemudian pada awal abad 20 akibat adanya kebijakan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* berupa pengelompokan etnis sosial kedalam satu kampung sehingga semakin mempertajam dan mempertegas eksklusifitas masing-masing kelompok. Di era pasca kemerdekaan tercatat adanya pemburuan warga Tionghoa akibat tuduhan komunisme sekitar tahun 1965, sampai puncaknya yang semakin memperuncing catatan kelim hubungan pribumi dan Etnis Tionghoa yaitu adanya terjadi sentimen antiTionghoa pada kerusuhan rasial Mei 1998 (Budiati, 2010). Namun demikian, setiap ketegangan-ketegangan tersebut mampu diatasi dengan kemampuan komunitas Sudiroprajan untuk saling berinteraksi sehingga tumbuh rasa saling memahami. Interaksi yang terjadi dalam waktu yang lama kemudian menciptakan nilai bersama sehingga munculah proses asimilasi dalam komunitas Sudiroprajan.

Bentuk asimilasi semakin menguat setelah dikeluarkannya Keputusan Presiden No 6 Tahun 2000 pada masa Presiden Abdurahman Wahid tentang pencabutan Inpres No 14 Tahun 1967 terkait pelarangan agama, kepercayaan, ekspresi seni, dan kebudayaan Tionghoa. Kelurahan Sudiroprajan kemudian menjadi simbol perkampungan Etnis Tionghoa sudah terjadi rekonsiliasi perkawinan fisik yang memunculkan perkawinan budaya atau sebaliknya (Widyaningsih, 2007). Salah satu kegiatan yang menjadi simbol kerukunan yaitu adanya Grebek Sudiro, sebuah acara budaya yang digelar sehari sebelum Imlek. Dalam acara ini, masyarakat Sudiroprajan menggelar karnaval dengan mengusung beberapa gunung Jawa dan Tionghoa, seperti hasil bumi, sayuran, serta gunung makanan khas dari dua kelompok etnis.

Asimilasi merupakan bentuk terjemahan proses adaptasi komunitas Etnis Tionghoa di Sudiroprajan. Adaptasi dalam bentuk asimilasi menjadi kunci bagi resiliensi komunitas Etnis Tionghoa dalam menghadapi ancaman, tekanan, maupun gejala yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam ilmu sosial terdapat tumpang-tindih antara terminologi asimilasi dan akulturasi. Beberapa pendapat menyatakan bahwa terminologi asimilasi cenderung lebih banyak digunakan dalam ilmu sosiologi sementara terminologi akulturasi lebih banyak digunakan dalam ilmu-ilmu antropologi. Namun pada dasarnya praktik asimilasi mengharuskan komunitas minoritas untuk menyesuaikan dirinya dengan komunitas mayoritas. Ini berarti bahwa ukuran bagi keberhasilan asimilasi dilihat dari komunitas yang mayoritas. (Gordon dalam Poerwanto, 1999).

Maka dari itu penelitian ini berusaha untuk menggali terkait bagaimana asimilasi sebagai bentuk adaptasi sosial mampu menghadapi ancaman, tekanan, dan gejala. Asimilasi yang berada dalam kerangka besar resiliensi skala

komunitas kampung Sudiroprajan memberikan gambaran kontekstual dimana komunitas masyarakat kampung kota mampu menyelesaikan ancaman, tekanan, dan gejala dengan caranya sendiri yang khas.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini dibawah payung pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivistik dengan paradigma interpretif. Kedalaman dalam penelitian kualitatif diwujudkan dalam bentuk penelitian yang bersifat eksploratif terhadap obyek penelitian. Sementara itu kedinamisan penelitian kualitatif tercermin dari interaksi antara peneliti dengan sumber data, sehingga dalam pengumpulan data maupun pembahasan setiap penelitian tidak terikat oleh nilai-nilai tertentu selain itu karena peneliti memiliki sudut pandang dan latar belakang tertentu (Sugiyono, 2011).

Lebih lanjut lagi, penelitian kualitatif memiliki banyak jenisnya, namun demikian dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan studi kasus dalam hal ini merupakan sebuah pendekatan penelitian yang memandang studi kasus sebagai sebuah metode penelitian bukan hanya sebagai lokasi penelitian. Jenis penelitian ini terutama diadaptasi dari pendekatan studi kasus model Robert K. Yin. Studi kasus menurut Yin (2008) berusaha menjelaskan penelitian *how* atau *why* yang berfokus pada fenomena penelitian kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata tanpa adanya intervensi peneliti terhadap obyek penelitian.

Penelitian studi kasus ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*In-depth Interview*) terhadap berbagai narasumber. Pemilihan narasumber dilakukan pada orang-orang tertentu yang dinilai menguasai permasalahan (*purposive sampling*).

Tabel 1. Narasumber Penelitian

Aspek	Laweyan	Sudiroprajan
Kelembagaan	Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan (FPKBL)	Persatuan Masyarakat Surakarta (PMS)
Masyarakat/Pelaku	13 Pengusaha Batik	14 Warga masyarakat sekitar
Birokrasi	Kantor Kelurahan	Kantor Kelurahan

Sumber: Analisis penulis, 2017

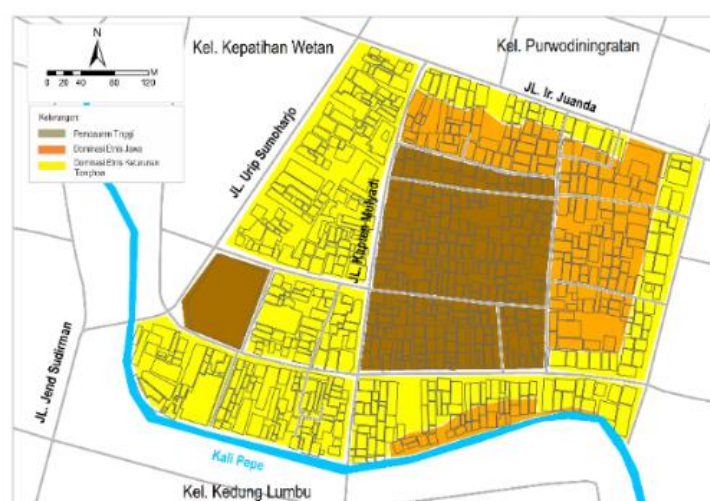
3. PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai konsep asimilasi di Kampung Sudiroprajan dijabarkan dalam perkawinan campur, pembauran, dan perpindahan keyakinan.

3.1 Pembauran

Pembauran merupakan istilah yang paling mudah dimengerti untuk menggambarkan kehidupan Kampung Sudiroprajan oleh masyarakat itu sendiri karena secara eksplisit istilah ini sering muncul dari hasil wawancara. “Kalau berbicara masalah pembauran disini nomer satu, bahkan se-Indonesia sering jadi percontohan” (Wawancara Kok Da, 26 Juli 2017). “Pembauran sudah menyentuh berbagai level generasi baik tua, muda, maupun anak-anak mampu saling berinteraksi bersama seperti tidak ada sekat yang memisahkan. China atau jawa, *cilik gedhe* (besar kecil) bareng dan tidak mau tahu man china mana jawa, china yang murni bisa dibilang sudah tidak ada”. (Agus Bagiyono, 26 Juli 2017).

Namun demikian, kalau berbicara Kampung Sudiroprajan secara umum, pembauran terutama terjadi di wilayah ‘kampung-kampung’ istilah yang biasa disebutkan untuk mengidentifikasi wilayah Sudiroprajan yang berada didalam. Sementara itu kecenderungan eksklusivitas terlihat pada kelompok masyarakat keturunan Etnis Tionghoa yang tinggal di pinggir jalan. “Interaksinya bagus, kalo yang bagus itu yang china *grass root*, menengah kebawah, kalo yang *high* itu tertutup, kalo membaur kemasyarakat ya gak mau membaur” (Wawancara Sugiyanto, 25 Juli 2017). Kampung yang sudah terjadi pembauran komunitas Etnis Tionghoa dengan pribumi terutama terkonsentrasi di kampung Balong dan Mijen. Secara spasial gambaran pembauran dapat diamati melalui gambar dibawah ini.



Gambar 2. Spasial Pembauran Sudiroprajan
Sumber: Observasi Lapangan, 2017

3.1.1 Bahasa dan Interaksi

Etnis Tionghoa sudah berabad-abad lalu datang di Kota Solo. Diperkirakan terdapat rentang lima generasi hingga tiga generasi hingga saat ini. “Suku yang tergolong pertama datang yaitu Ho Kyan sementara suku yang relatif akhir datang yaitu suku Fu Jyen” (wawancara Sumartono H, 2 Agustus 2017). Rentang generasi yang sudah cukup lama menyebabkan beberapa produk budaya yang melekat juga semakin lama semakin luntur.

Produk budaya yang pertama berupa bahasa. Bahasa menjadi cara utama untuk berinteraksi dengan orang lain. Kelompok komunitas Etnis Tionghoa di Kampung Sudiroprajan sebagian besar saat ini sudah tidak bisa berbahasa Tionghoa. “Kalau saya sudah tidak bisa, kalau kakak-kakak saya masih bisa berbahasa china” (Wawancara Sam Hao Tung, 24 Juli 2017). Keturunan Etnis Tionghoa yang masih bisa berbahasa Tionghoa saat ini berada pada kelompok generasi yang berusia 60 tahun keatas. Maksud dari mampu berbahasa Tionghoa disini adalah mereka yang mampu berbahasa Tionghoa sebagai bahasa ibu, yang berarti mampu berbahasa Tionghoa karena memang keluarga juga berbahasa Tionghoa dan terutama diturunkan melalui orang tua, bukan karena belajar atau mendapatkan pendidikan bahasa Tionghoa. Dalam berinteraksi, komunitas Etnis Tionghoa saat ini menggunakan bahasa Jawa maupun bahasa Indonesia seperti masyarakat secara umum. Sudah tidak terlihat adanya perbedaan logat dalam penggunaan bahasa, komunitas Etnis Tionghoa sudah benar-benar menggunakan bahasa Jawa dan Indonesia sebagai bahasa ibu, baik untuk berinteraksi dengan keluarga maupun berinteraksi dengan masyarakat secara luas. Sisa-sisa kosa kata Tionghoa sangat sedikit yang masih digunakan hanya contoh untuk penyebutan nilai uang seperti *cepek*, *gopek*, *cemban* dan seterusnya.

3.1.2 Rumah dan Tempat Tinggal

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa komunitas keturunan Etnis Tionghoa pada awalnya memang diberikan tanah di sekitar Sudiroprajan melalui salah satu kebijakan *wijkenstelsel* yang membagi kawasan tempat tinggal sesuai etnis tertentu. Wilayah tersebut merupakan pusat ekonomi di Kota Solo dengan adanya Pasar Gedhe. Mereka kemudian juga membangun Klenteng Tien Kok Sie sebagai tempat ibadah. Wilayah Sudiroprajan kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan komunitas Etnis Tionghoa. Sehingga keberadaan Pasar dan Klenteng bisa menjadi penanda peradaban komunitas Etnis Tionghoa di suatu wilayah.

Rumah-rumah kemudian semakin banyak terutama untuk memenuhi kebutuhan baik untuk bermukim maupun juga untuk kepentingan berdagang. Rumah-rumah di sekitar Pasar Gedhe kemudian menjadi semacam ruko-ruko yang umumnya terdiri dari dua lantai yang saling berdempetan menghadap ke jalan. “Kenapa rumah mereka tinggi dan gedhe karena diatas pasti untuk gudang, seperti ruko itu lo, dulunya pake kerekan” (Wawancara Jawul 25 Juli 2017).

Tidak semua komunitas Etnis Tionghoa mampu sukses dalam berdagang dan mampu membuat ruko. Sebagian lainnya kemudian tinggal di wilayah Sudiroprajan namun tidak langsung berada dekat dengan Pasar Gedhe. Mereka awalnya juga tinggal di wilayah magersari yang akhirnya mampu untuk membeli rumah dari orang pribumi. Wilayah-wilayah itu yang sekarang berkembang menjadi wilayah Kepanjen, Mijen, dan Balong yang menjadi konsentrasi pembauran dan perkawinan campur etnis keturunan Tionghoa dan Jawa. “...ndak ada rumah yang asli china, dahulu yang punya ya orang pribumi terus dibeli, ya kecil-kecilan, dulunya magersari lama-lama punya uang terus dibeli” (Wawancara Kok Da 26 Juli 2017).

3.2 Perkawinan Campur

Perkawinan campur menjadi salah satu kunci utama resiliensi komunitas Etnis Tionghoa di Kampung Sudiroprajan. “Paling basis adalah karena disini adanya kawin campur, sebuah elemen yang melekatkan mereka sebagai sebuah komunitas, sehingga ada semacam ketahanan sosial”. (Wawancara Jawul, 25 Juli 2017). Kemauan untuk menikah dengan Etnis Tionghoa menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang sudah sangat tinggi sehingga menganggap perbedaan etnis itu bukan menjadi penghalang. “...dalam melihat tetangga kampung tidak melihat etnis, mungkin secara fisik dapat dilihat mata sipit tetapi dari kecil seakan-akan mereka itu kita”. (Wawancara Sri Utomo, 24 Juli 2017).

Perkawinan campur yang ada di Kampung Sudiroprajan bukan merupakan sesuatu yang secara cepat terjadi begitu saja melainkan terjadi dari proses yang sudah sangat lama. “Segala sesuatu bisa menjadi bersama-sama itu butuh waktu dan proses” (wawancara Sumartono H, 2 Agustus 2017). Dalam catatan sejarah, seperti yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya bahwasanya kelompok Etnis Tionghoa datang ke Surakarta dimulai pada abad ke 18 pada tahun tersebut mulailah adanya pengenalan awal dan pembiasaan orang Jawa untuk bertemu, mengenal, dan berinteraksi dengan kelompok Etnis Tionghoa. Setelah itu baru ditahun 1745 kelompok Etnis Tionghoa di Surakarta dan sekitarnya mendapatkan tanah di sekitar Pasar Gedhe yang kemudian memunculkan komunitas Etnis

Tionghoa Sudiroprajan. Selama bertahun-tahun Etnis Tionghoa berinteraksi dengan etnis pribumi sehingga terjadi sebuah pembiasaan. “Bagi masyarakat yang sudah dari kecil berinteraksi dengan Etnis Tionghoa, maka mereka merasa tidak ada sekat karena sejak kecil sudah menjadi teman sepermainan. Kalo dari kecil dicampur itu mereka akan merasa sama”. (Wawancara Sumartono H, 2 Agustus 2017). “Pembaurannya memang betul-betul hebat, mertua saya juga campuran, dan menantu saya juga campuran”. (Wawancara Sam Hao Tung, 24 Juli 2017).

3.3 Perpindahan Keyakinan

Pada awalnya Etnis Tionghoa datang ke Indonesia dengan membawa kepercayaan yang sudah dianutnya dari negeri asal. Kepercayaan itu berupa Agama Konghucu, Taoisme maupun Budha. Maka dari itu seperti telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya bahwa Klenteng menjadi simbol keberadaan komunitas Etnis Tionghoa karena pasti komunitas tersebut membutuhkan tempat untuk beribadat.

Namun demikian, mayoritas komunitas etnis di Tionghoa saat ini sudah memeluk agama Kristen dan Katholik. Perpindahan agama itu terjadi sekitar tahun '70-an hingga '80-an sehingga generasi komunitas Etnis Tionghoa yang masih memeluk kepercayaan asli baik Konghucu, Taoisme, maupun Budha saat ini bisa dikatakan sudah sangat sedikit. “Sekarang kan kebanyakan china masuk Kristen, bukan kong hucu, dulu waktu saya masih kecil china itu adatnya masih kental, didepan pintu buat sajen, tahun 80-an waktu saya masih kecil masih sering melihat itu” (Wawancara Sugiyanto 25 Juli 2017). “Yang tua-tua masih di klenteng, la kemudian generasi anak-anak mereka kan kemudian golek gampang mlebu gereja wae (cari gampang pindah ke gereja saja)” (Wawancara Jawul 25 Juli 2017).

Perpindahan agama yang dianut oleh mayoritas komunitas Etnis Tionghoa menunjukkan adanya bentuk perubahan elemen berkehidupan yang mendalam karena agama sebagai sebuah jalan spiritual yang paling privat dari seorang individu. Berarti pula komunitas Etnis Tionghoa bisa membuka diri dan menerima nilai-nilai baru yang lebih umum di masyarakat. Namun nilai-nilai kebudayaan Tionghoa masih digunakan dan bercampur dengan ritus ibadah agama Kristen maupun Katolik yang mereka yakini. Percampuran tersebut terlihat terutama ketika seseorang meninggal. Komunitas Etnis Tionghoa khususnya di Surakarta memiliki tempat persinggahan jenazah yang dikenal dengan Tiong Ting. Tiong Ting digunakan untuk persinggahan jenazah sebelum jenazah itu dimakamkan maupun dikremasi. Kremasi merupakan ritual pembakaran jenazah dari kepercayaan baik Konghucu, Taoisme, Budha maupun Hindu.

3.3.1 Kebijakan Orde Baru

Orde baru merupakan masa kelam bagi kelompok-kelompok etnis keturunan Tionghoa. Ordebaru merupakan masa dari pemerintahan Presiden Suharto berada pada rentang waktu 1966 sampai 1998. Masa pemerintahan ini berpijak dari sebuah pengalaman pahit sejarah G30 S/PKI. Pemerintahan ini diawali dengan kondisi traumatik terhadap ideologi komunisme. Ideologi komunisme dianut dan terkonsentrasi di negara besar Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok.

Salah satu kebijakan yaitu dengan melarang segala bentuk kegiatan dan kebudayaan dari Tionghoa yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967. Peraturan tersebut memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sosial komunitas etnis Tionghoa di Indonesia dan Surakarta khususnya.

Terkait dengan agama, kebijakan ordebaru yang sangat membatasi budaya Tionghoa menyebabkan komunitas Etnis Tionghoa kemudian mayoritas berpindah agama ke Kristen maupun Katolik. Komunitas Etnis Tionghoa dahulu menganut kepercayaan Konghucu dan beribadah di klenteng. Ritus agama Konghucu sangat kental dengan prosesi upacara dan ritual tertentu yang identik dengan kebudayaan Tionghoa. Pembatasan ini akhirnya mempengaruhi kebebasan dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan sehingga kebijakan Orde Baru dapat dikatakan sebagai salah satu faktor eksternal terjadinya perpindahan keyakinan. "Mungkin pada waktu itu, mereka semacam ketakutan makanya trus pindah, mungkin lo itu" (Wawancara Herman 2 Agustus 2017).

3.3.2 Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan sebenarnya merupakan faktor turunan dari kebijakan Orde Baru sebagai faktor eksternal penyebab perpindahan keyakinan Etnis Tionghoa. Kebijakan pembatasan kebudayaan mempengaruhi keberadaan sekolah-sekolah Tionghoa yang sudah ada sebelumnya. Sekolah-sekolah tersebut harus ditutup sehingga komunitas Etnis Tionghoa harus beralih bersekolah di sekolah Kristen maupun Islam. Namun mayoritas komunitas Etnis Tionghoa lebih memilih bersekolah di sekolah Kristen. "Kalau generasi saya sudah banyak masuk Kristen, soalnya pengaruh sekolahe *niku* (itu) kan kalau sekolah sekolah cina *sampun* (sudah) ditutup pas ordebaru". (Wawancara Andreas 26 Juli 2017)

Perpindahan tempat bersekolah ini berarti terjadi sekitar tahun '60-an akhir pasca kebijakan ordebaru tahun 1966. Sehingga komunitas Etnis Tionghoa generasi kelahiran tahun '60-an mulai menempuh pendidikan di sekolah Kristen.

Generasi ini lah yang kemudian menjadi generasi yang secara masif berpindah agama karena pengaruh sekolah.

3.3.3 Budaya Terlalu Rumit

Etnis Tionghoa merupakan salah satu etnis besar di dunia yang memiliki produk budaya yang sudah tua dan mapan. Budaya Tionghoa sudah sangat mengakar dalam setiap sendi kehidupan masyarakat yang sudah menjadi pondasi, filosofi, dan paradigma berkehidupan. Produk budaya Tionghoa kemudian bercampur dan berkembang beriringan dengan sistem dan ritual kepercayaan. Budaya Tionghoa penuh dengan filosofi sehingga memiliki aturan dan norma tertentu.

Seiring berkembangnya zaman, sebagian orang menganggap menjalankan norma kebudayaan secara utuh dirasa terlalu rumit sehingga dalam beberapa aktivitas norma tersebut tidak dijalankan secara utuh. Kondisi demikian terjadi juga di Masyarakat Sudiroprajan, masyarakat yang semakin modern orientasi berfikir lebih kepada efisiensi dan efektivitas. Penyederhanaan budaya terjadi seperti pada prosesi pernikahan dan kematian. Proses penyederhanaan budaya tersebut tentu beriringan dengan asimilasi dari prosesi-prosesi dalam agama Kristen atau Katholik yang mereka anut sekarang.

Pada prosesi pernikahan masyarakat cenderung lebih fleksibel dengan prosesi disesuaikan pada kemampuan ekonomi. Untuk masyarakat kalangan mampu dapat menjalani prosesi pernikahan dengan disertai pernik-pernik budaya Tionghoa yang diinginkan namun bagi kalangan biasa, prosesi akan lebih sederhana. *“sahniki pun modern biasa mawon, kulo saking ciliki ndelok sing budaya china mboten enten dados biasa mawon”* (sekarang sudah modern sehingga biasa saja, saya dari kecil sudah jarang melihat budaya china disini jadi sudah biasa) (Wawancara Jyi Ping, 26 Juli 2017).

Begitu pula dengan prosesi pemakaman. Komunitas Etnis Tionghoa juga cenderung memilih menyesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga. Ada dua pilihan yaitu dikremasi ataupun dikuburkan di pemakaman khusus Tionghoa. “kalo kremasi itu tergantung permintaan pihak keluarga, kalo dikremasi kan lebih praktis lah, pengiritan, kan nggak perlu beli tanah untuk makam per meter persegi” (Wawancara Andreas, 2 Agustus 2017).

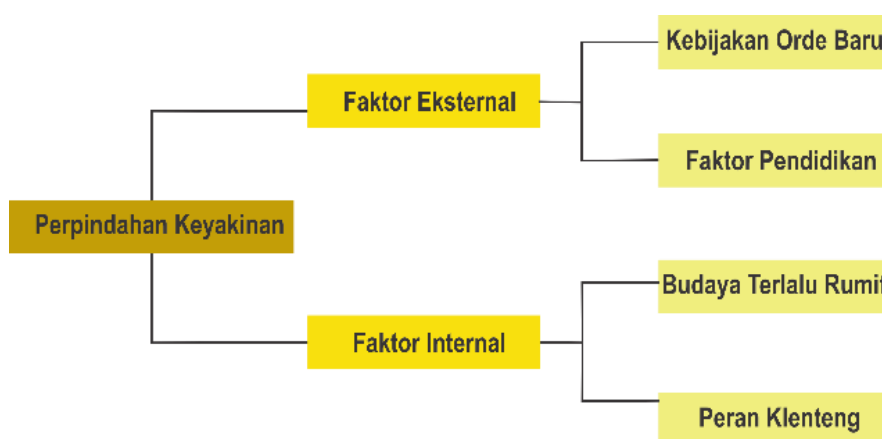
Budaya yang terlalu rumit menandakan adanya perubahan dari dalam sehingga termasuk faktor internal yang mengakibatkan perpindahan keyakinan tersebut.

3.3.4 Peran Klenteng

Pada masa lalu pusat kegiatan ibadah komunitas Etnis Tionghoa di Sudiroprajan yaitu berada di Klenteng *Tien Kok Sie*. Klenteng *Tien Kok Sie* berdiri tahun 1745 atau dibangun hampir bersamaan dengan pendirian Kraton Surakarta. Klenteng ini awalnya berada di Kartosuro yang kemudian pindah ke Solo beriringan dengan pindahnya ibukota Kasultanan. Klenteng ini menempati bangunan seluas lebih kurang 250 m² terdiri dari bagian ruang pelataran depan, ruangan *Thia*, ruangan *Sien Bing* dan bangunan rumah tangga penjaga Klenteng. Selain Sembahyang, di Klenteng ini pada waktu tertentu mengadakan kebaktian misalnya bagi umat Tri Dharma pada setiap tanggal 16 Imlek.

Namun klenteng saat ini lebih berperan sebagai simbol keberadaan komunitas masyarakat Tionghoa di Sudiroprajan. Peran sebagai pusat kegiatan keagamaan sudah tidak lagi dimiliki. Peran tersebut sekarang lebih kepada mengisi kegiatan-kegiatan perayaan seperti Imlek maupun berbagai kegiatan sosial. Hal tersebut terjadi karena, seperti sudah dituliskan pada bagian sebelumnya saat ini komunitas Etnis Tionghoa sebagian besar sudah memeluk agama Kristen maupun Katolik sehingga masyarakat yang beribadah di klenteng hanya sebagian kecil. *“Kulo Pun mboten ten klenteng, yen riyen ayah kulo masih ten klenteng, tanggal 15 ritual-ritual”* (Wawancara Andreas 26 Juli 2017).

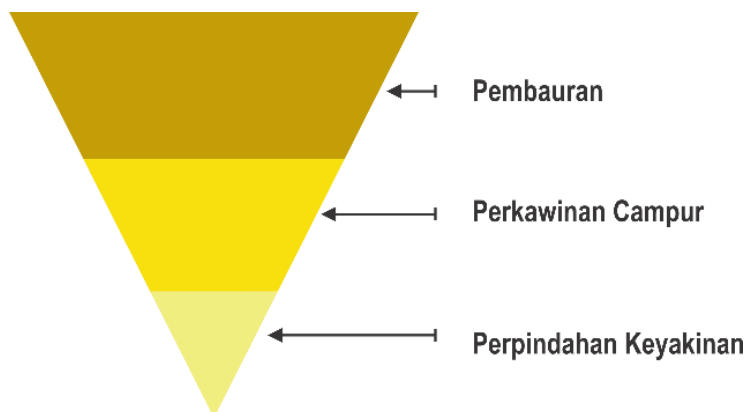
Peran Klenteng menjadi faktor internal terjadinya perpindahan keyakinan Etnis Tionghoa. Berdasarkan uraian diatas Klenteng tidak mampu menjaga fungsi ‘benteng religi’ namun hanya bisa berfungsi ‘benteng kultural’ saja.



Gambar 3. Skema Penyebab Perpindahan Keyakinan Kampung Sudiroprajan
Sumber: Analisis Penulis, 2017

4. KESIMPULAN

Konsep asimilasi di Kampung Sudiroprajan terdiri dari tiga yaitu pembauran, perkawinan campur dan perpindahan keyakinan. Ketiga konsep tersebut juga dapat dipandang sebagai urutan kedalaman proses asimilasi.



Gambar 4. Lapisan Asimilasi Sudiroprajan
Sumber: Analisis Penulis, 2017

Pembauran terdiri meliputi bahasa interaksi dan pembauran rumah tempat tinggal. Pembauran terjadi karena Kampung Sudiroprajan menjadi tempat dan seting yang memungkinkan segala proses sosial tersebut terjadi.

Perkawinan campur menjadi simbol kedalaman asimilasi di Kampung Sudiroprajan. Asimilasi menjadi basis bagi terjadinya hubungan yang cair antara Etnis Tionghoa dan Jawa.

Perpindahan keyakinan terjadi karena faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya kebijakan Orde Baru dan faktor pendidikan sementara faktor internal disebabkan budaya terlalu rumit dan peran Klenteng.

REFERENSI

- Adger, W. N. 2000. "Social and ecological resilience : are they related ?", 3, 347–364.
- Budiati, Atik Catur. 2010. "Ketahanan Masyarakat Kota Solo (Model Pengelolaan Konflik Tionghoa – Jawa melalui Pendekatan Ketahanan Masyarakat)" *Jurnal Sosiologi Dilema*. 25, 70- 78
- Budiharjo, Eko. 2009. *Perumahan Permukiman di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Brown, A., Dayal, A., & Rumbaitis Del Rio, C. 2012. "From practice to theory: emerging lessons from Asia for building urban climate change resilience". *Environment and Urbanization*, 24(2), 531–556.
- Davoudi, S., Shaw, K., Haider, L. J., Quinlan, A. E., Peterson, D., Wilkinson, C., ... Quinlan, A. E. 2012. "Resilience : A Bridging Concept or a Dead End? " *Reframing " Resilience : Challenges for Planning Theory and Practice Interacting Traps: Resilience Assessment of a Pasture Management System in Northern Afghanistan Urban Resilience: What Does it Mean in Planning Practice? Resilience as a Useful Concept for Climate Change Adaptation ? The Politics of*

- Resilience for Planning : A Cautionary Note*, 9357(May), 299–333.
- Godschalk, D. R. 2003. "Urban Hazard Mitigation: Creating Resilient Cities". *Natural Hazards Review*, 4(3), 136–143. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1527-6988\(2003\)4:3\(136\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1527-6988(2003)4:3(136)) diakses 4/3/17
- IFRC. 2012. *Characteristics of a Safe and Resilient Community Community Based Disaster Risk Reduction Study*. ARUP International Development, (September), 184. <https://doi.org/1224200E> diakses 7/4/17
- Indrayanti, Elyas R. 2009. *Perekonomian Etnis Tionghoa di Surakarta tahun 1959-1974*. Skripsi program studi sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Lang, T. 2012. "How do cities and regions adapt to socio-economic crisis? Towards an institutionalist approach to urban and regional resilience". *Raumforschung Und Raumordnung*, 70(4), 285–291. <https://doi.org/10.1007/s13147-012-0170-2> diakses 7/4/2017
- Matyas, D., Regional, S., Adviser, R., Pelling, M., & Kingdom, U. 2015. "Positioning resilience for 2015: the role of resistance , incremental adjustment and transformation in disaster risk management policy", 39, 1–18.
- Perwanto, Hari. 1999. "Asimilasi, Akulturasi, dan Integrasi nasional". *Humaniora*.12. 29-37
- Roychansyah, Muhammad S.2012.Kota Tangguh: Definisi, Konsep, Konteks. UGM. Yogyakarta
- Setiawan, Bakti. 2010. *Kampung Kota Dan Kota Kampung-Potret Tujuh Kampung di Kota Jogja*. Yogyakarta: Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM
- Simmie, J., & Martin, R. 2010. "The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach", (January), 27–43.<https://doi.org/10.1093/cjres/rsp029> diakses 14/3/2017
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wilkinson, C. 2011. "Social-ecological resilience : Insights and issues for planning theory".
- Widyaningsih, Eka Deasy.2007. *Masyarakat "china balong" Sudiroprajan (Studi Interaksi Sosial Masyarakat China-Jawa Di Surakarta Pada Pertengahan-Akhir Abad XX)*.Skripsi program studi sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Žilėnienė, B. P. 2014. "Integrated Approach to a Resilient City : Associating Social , Environmental and Infrastructure Resilience in its Whole", 1–14.